

LKjIP 2019

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unsur Pemerintah sebagai unsur penyelenggaran negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan OPD Tahun 2019 sebagai media akuntabilitas dan informasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2019.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang ini dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Magelang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA
MAGELANG**

CHRISATRYA YONAS, N, B, ST
NIP. 19690527 200312 1 002

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Sistematika	2
I.3 Penjelasan Umum Organisasi	2
I.4 Aspek Strategis Organisasi	7
I.5 Isu-isu Strategis Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
II. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
II. 2 Rencana Strategis	11
II. 3 Rencana Kinerja Tahunan.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
III. 1 Kerangka Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja.....	22
III. 2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	24
III.2.1 Terpenuhinya sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan.....	24
III. 3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	33
BAB IV PENUTUP.....	38
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1	2
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1	5
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	6
Tabel 1.4	6
Tabel 2.1	10

Tabel 2.2	12
Tabel 2.3	13
Tabel 2.4	14
Tabel 2.5	17
Tabel 3.1	22
Tabel 3.2	22
Tabel 3.3	24
Tabel 3.4	33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagai unit kerja dibawah Pemerintah Kota Magelang, tugas dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 yaitu : "MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS", visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, namun misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah pada misi "MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". Pemenuhan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Magelang demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2019 yang selain sebagai pelaksanaan amanah peraturan perundang-undangan tersebut di atas sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2019, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021, Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang 2016-2021 dan Renja DPU-PR Kota Magelang Tahun 2019.

I.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tahun 2019 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

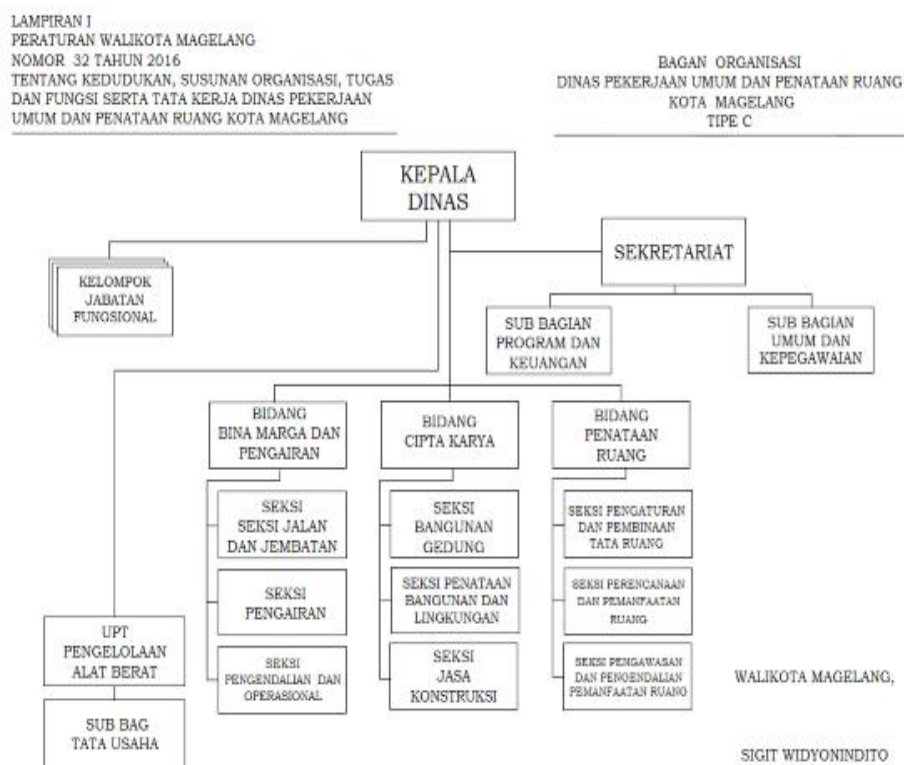
- a. Bagi eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2019.
- b. Bagi internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Magelang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Magelang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

I.3 Penjelasan Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, dengan susunan organisasi sebagaimana terlihat pada :

Gambar 1.



2. Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah. Sesuai dengan Perda tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tersebut merupakan pengganti Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perda Nomor 4 Tahun 2008 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris

Dibawah Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

III. Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan

Dibawah Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan
- b) Kepala Seksi Pengairan
- c) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional

IV. Kepala Bidang Cipta Karya

Dibawah Kepala Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Bangunan Gedung
- b) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c) Kepala Seksi Jasa Konstruksi

V. Kepala Bidang Penataan Ruang

Dibawah Kepala Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- b) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- c) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

VI. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Alat Berat

Dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Alat Berat adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Alat Berat

4. Keadaan Pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang terbagi atas 3 (Tiga) Bidang, 1 (Satu) Sekretariat dan 1 UPTD. Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang sampai dengan Januari 2019 berjumlah 45 orang dengan komposisi sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menurut Jenis Kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 91,67 % dari total pegawai sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	41	91,11 %
2	Perempuan	4	8,89 %
		45	100,00 %

Sumber : Data Kepegawaian DPU Kota Magelang, 2019

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagian besar adalah Sarjana dan Sarjana Muda atau sebesar 37,78% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Pasca Sarjana/ S2	6	13,33%
2	Sarjana/ Sarjana Muda	17	37,78%
3	SMA dan sederajat	13	28,89%
4	SMP dan sederajat	5	11,11%
5	SD dan sederajat	4	8,89%
		45	100%

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang, 2019

❖ Menurut Golongan/Ruang :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang menurut pangkat/golongan paling banyak adalah pegawai dengan golongan II atau sebesar 35,56 % dari total pegawai sebagaimana tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang Menurut Golongan/Ruang

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IVA	3	6,67 %
2	Golongan IIID	7	15,56 %
3	Golongan IIIC	5	11,11 %
4	Golongan IIIB	7	15,56 %
5	Golongan IIIA	2	4,44 %
6	Golongan II	16	35,56 %
7	Golongan I	5	11,11 %
		45	100%

Sumber : Data Kepegawaian DPU PR Kota Magelang, 2019

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang paling banyak bergolongan/ruang II, sebagian dari mereka berijazah SMA, sehingga untuk tugas dan operasional di lapangan dapat dimaksimalkan.

❖ Menurut Jenjang Jabatan :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang Pejabat Eselon IV B masih kosong yang diberi tugas PLT Kasubag. TU UPTD Alat Berat adalah Kepala UPTD Alat Berat. Rincian komposisi pegawai adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang Menurut Golongan/Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II B	1	2,22 %
1	Eselon III A	1	2,22 %
2	Eselon III B	3	6,67 %
3	Eselon IV A	12	26,67 %
4	Eselon IV B	0	0,00 %
5	Staf	28	62,22 %
		45	100%

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang, 2019

Berdasarkan tabel 1.4 diatas terlihat bahwa mayoritas sebanyak 62,22% karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah staf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan tangan kerja DPU-PR cukup signifikan untuk menjalani tugas-tugas lapangan.

I.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai dengan Misi 3 dari Kepala Daerah Terpilih adalah meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek strategis tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, yang terdiri dari :

- 1) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik ;
- 2) Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataan ruangnya.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ingin dicapai tersebut, dilaksanakan melalui program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang :

I. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong
8. Program Rehabilitasi/ peningkatan Saluran Drainase/ gorong-gorong
9. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya

II. Urusan Penataan Ruang

1. Program Pemanfaatan Ruang
2. Program Perencanaan Tata Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

I.5 Isu-isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang ditentukan dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perlu juga dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Selain itu perlu dipertimbangkan hasil telaahan terhadap Renstra Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRWK serta KLHS.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari faktor internal dan eksternal OPD. Identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga dan Pengairan
 - 1) Keterbatasan staf yang produktif
 - 2) Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa
 - 3) Kurangnya bangunan pelengkap jalan di beberapa ruas jalan
 - 4) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai, terutama yang bisa diakses penyandang cacat
 - 5) Masih perlu penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang
 - 6) Masih perlu peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas
 - 7) Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pelaksanaan di Bidang Bina Marga
 - 8) Masih ada penyedia jasa yang berkualitas rendah
 - 9) Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan deras
 - 10) Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi karena perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
 - 11) Semakin tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan genangan dan banjir
 - 12) Adanya kejadian bencana alam, longsor, amblas yang mengancam konstruksi saluran irigasi dan drainase
 - 13) Semakin banyaknya pemanfaatan lahan irigasi yang tidak sesuai peruntukannya
 - 14) Masih kurangnya proporsi dimensi saluran drainase dengan debit air yang akan ditampung
 - 15) Masih kurangnya jumlah saluran cross rain (shipon) pembuang drainase

- 16) Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan irigasi dan drainase
- 17) Peraturan perundang-undangan yang sering berubah sehingga menyulitkan pelaksanaan perizinan ESDM
- 18) Masih kurangnya penggunaan peralatan hemat energi di lingkungan pemerintah sehingga belum bisa mengurangi anggaran pemanfaatan energi dan belum bisa menjadi contoh bagi perkantoran swasta

2. Bidang Cipta Karya

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin dan difabel di perkotaan
- 2) Adanya aturan/ regulasi yang tupang tindih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Cipta Karya
- 5) Kekurangnya dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi
- 6) Keterbatasan staf yang produktif
- 7) Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa

3. Bidang Penataan Ruang

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih kurang
2. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya tata ruang kota Magelang

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan mengacu pada Indikator Pemerintah Kota Magelang dan Indikator Kinerja Utama pendukung IKU Pemerintah Kota Magelang yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi pendukung. Disamping Indikator Kinerja Utama, Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta indikator-indikator kinerja yang lain. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kota Magelang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	2	3
1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	Meter
2	Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%
3	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	%
4	prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	%
5	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%
6	Jumlah shipon yang dibangun	Buah
7	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	%
8	Persentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%
9	Persentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	%
10	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	%
11	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, Manajemen Konstruksi, Tenaga Ahli, Tepat Waktu dan Efisien	%

12	Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL)	%
13	Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang	%
14	Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%
15	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	%
16	Rasio reklame ber IMB persatuan perjumlah reklame berdiri	%
17	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang belum ber IMB	%
18	% saluran irigasi dalam kondisi baik	%
19	Ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	%

II.2 Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yaitu mendukung visi Pemerintah Kota Magelang **“Terwujudnya Kota Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern Dan Cerdas Yang Dilandasi Masyarakat Yang Sejahtera Dan Religius”**. Misi Pemerintah Kota Magelang adalah:

- 1). Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2). Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
- 3). Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4). Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
- 5). Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

Berdasarkan visi misi kota, posisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi Masyarakat Sejahtera melalui misi Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2. Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator kinerja

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tujuan dan sasaran strategis DPU PR Kota Magelang

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan
2. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Meningkatnya tertib administrasi penyedia jasa konstruksi
3. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	a. Tertib administrasi perkantoran dan kepegawaian b. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	a. Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran b. Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan
5. Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Tertib administrasi keuangan dan waktu pengiriman laporan keuangan
6. Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan dan keuangan perangkat daerah	Tertib pengendalian kegiatan dan pelaporan kinerja

b. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau

bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran DPUPR Kota Magelang

Sasaran	Indikator Sasaran
a. Terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang responsif, efisien dan efektif	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
a. Terwujudnya kinerja aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencerminkan nilai-nilai good governance	Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi
a. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan dengan baik dan tertib dalam rangka profesionalisme menuju pelayanan publik yang prima	Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
a. Terwujudnya prasarana jalan, saluran irigasi dan drainase perkotaan yang berkualitas b. Terwujudnya penyediaan air baku bagi masyarakat perkotaan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Proporsi Panjang Jalan kota Magelang dengan kondisi baik Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
a. Terwujudnya pengembangan kawasan strategis sebagai simpul perekonomian, sosial, budaya dan pariwisata	Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis terlaksana dengan baik sehingga kegiatan ekonomi, sosial budaya dan pariwisata oleh masyarakat menjadi berkembang di kawasan tersebut
b. Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan	Pemeliharaan/peningkatan infrastuktur jalan untuk mencapai kondisi jalan dalam keadaan baik

II.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2019 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan DPUPR Tahun 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun 2. Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 3. Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik 4. Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik 5. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 6. Jumlah shipon yang dibangun 7. Prosentase	1742 meter 94 % 92% 66,65% 86% 7 buah	1. Program Pembangunan jalan dan jembatan 2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 4. Program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 5. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 6. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air

		infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%	minum dan air limbah
		8. Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	4 wilayah	8. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
		9. Prosentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		10. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha konstruksi baik baru maupun perpanjangan	76%	10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		11. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	11. Program pengaturan jasa konstruksi
		12. Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL)	100%	12. Program pengawasan jasa konstruksi
		13. Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang	100%	13. Program perencanaan tata ruang
		14. Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	14. Program pemannfaatan ruang
				15. Program pengendalian pemanfaatan ruang

		15. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	
		16. Rasio reklame berIMB persatuan jumlah reklame berdiri	8%	
		17. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tat ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang belum ber IMB	35%	
		18. Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik	90%	
		19. Ketersediaan sarana dan prasarana bina marga	97%	

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2019**

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun 2. % panjang trotoar dalam kondisi baik 3. % jumlah jembatan dalam kondisi baik 4. % panjang jalan dalam kondisi baik 5. % infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	1742 meter 66,65% 94 % 92% 80%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Pemeliharaan jalan 2. Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatab (DAK) 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 4. Rehabilitasi/Peningkatan jalan Kalibening III 5. Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	2.110.000.000 752.059.000 15.732.741.000 1.078.544.000 444.000.000 632.000.000

		1. Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik	90%	6. Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Pemeliharaan jaringan irigasi 2. Identifikasi Saluran Irigasi Kota Magelang	106.150.000 82.000.000 53.750.000
		1. % pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	4 wilayah	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 1. Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 1. Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar 2. Pembangunan kolam renang (Tahap 6) 3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 4. Peningkatan oembangunan sarana dan prasarana olahraga	1.715.000.000 1.250.000.000 10.500.000.000 1.118.032.000 11.482.738.000

		<ol style="list-style-type: none"> 1. % panjang drainase dalam kondisi baik 2. Jumlah shipon yang dibangun 	<p>86%</p> <p>7 buah</p>	<p>Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan 2. Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara 3. Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban 4. Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong 5. Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan saluran drainase Kawasan Jl. Perintis Kemerdekaan 6. Peningkatan saluran drainase Jl. Waringin 7. Peningkatan saluran drainase Jl. Sidosari 8. Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya 9. Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang 10. Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Alun-alun Utara 11. Kegiatan Peningkatan/ Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu) 	<p>500.000.000</p> <p>1.990.000.000</p> <p>234.225.000</p> <p>1.609.825.000</p> <p>1.425.000.000</p> <p>575.300.000</p> <p>740.000.000</p> <p>685.300.000</p> <p>1.064.000.000</p> <p>500.000.000</p> <p>5.170.080.000</p>
--	--	--	--------------------------	---	--

		1. % perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	Program Perencanaan Tata Ruang	
		2. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	76%	1. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	386.778.000
		3. % peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	361.181.000
				3. Koordinasi Penataan Ruang Daerah	165.442.000
				Program Pemanfaatan Ruang	
				1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	175.268.000
				2. Survey dan pemetaan	13.648.000
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
				1. Pengawasan pemanfaatan ruang	160.079.000
		1. Rasio ketersediaan dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL)	100%	2. Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	49.004.000
		2. % perijinan yang sesuai tata ruang	100%	Program Pembangunan Sistem Informasi/data base	
		3. Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	Jalan dan Jembatan	
				1. Penyusunan data dan profil OPD	14.019.000
				Program Pengaturan Jasa Konstruksi	
				1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-	

		1. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	23.765.000
		1. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang ber IMB	35%	2. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	38.288.000
				3. Pembinaan jasa konstruksi	44.456.000
				4. Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	22.012.000
				Program pengawasan jasa konstruksi	
				1. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	
				2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	24.572.000
				3. Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	431.816.000
					26.000.000
				Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	
				1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	25.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPUPR Kota Magelang Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel III.1.

Tabel 3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Keterangan : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan oleh DPUPR Kota Magelang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPUPR Kota Magelang beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti pada tabel III.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan	1 Panjang Jalan penghubung baru yang dibangun	1742 meter	2055 meter	117,97%
2		% Panjang trotoar dalam kondisi baik	66,65%	74,83%	112,27%
3		% jumlah jembatan dalam kondisi baik	94%	94,59%	100,63%

		4	% panjang jalan dalam kondisi baik	92%	94%	102,17%
		5	% infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%	42,94%	53,68%
		6	pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	4 wilayah	4 wilayah	110%
		7	% panjang drainase dalam kondisi baik	86%	87,94%	102,26%
		8	Jumlah shipon yang dibangun	7 buah	9 buah	128,57%
		9	% perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	100%
		10	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik yang baru maupun perpanjangan	76%	65,10%	85,66%
		11	% peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	100%	400%
		12	% saluran irigasi dalam kondisi baik	90%	81%	90%
2	Terwujudnya bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan	13	Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL)	100%	8,33%	8,33%
		14	% perijinan yang sesuai tata ruang	100%	100%	100%
		15	Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%
		16	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	25,48%	98%
		17	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah	35%	223.21%	637,74%

			bangunan dan reklame yang ber IMB			
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Dari tabel di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 17 indikator, pada tahun 2019 target indikator – indikator tersebut harus dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan melaksanakan program dan kegiatannya di tahun tersebut.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis DPUPR Kota Magelang yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

III.2.1. Terpenuhi sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan

Tabel 3.3 Target Dan Realisasi Indikator Sasaran 2019

NO	SASARAN INDIKATOR	CAPAIAN KONDISI 2016	2019			TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN AKUMULATIF sd 2018 TERHADAP RPJMD 2021
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
Terpenuhi sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan							
1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	0 meter	1742 meter	2055 meter	117,97%	2242 meter	91,66%
2	% panjang trotoar dalam kondisi baik	63,71%	66,65%	74,83%	112,27%	71,9%	104,08%
3	% panjang drainase dalam kondisi baik	84%	86%	87,94%	102,26%	89%	98,81%
4	Jumlah shipon yang dibangun	6 buah	7 buah	9 buah	128,57%	10 buah	90%
5	Tersedianya update badan usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	72%	76%	65,10%	85,66%	80%	81,38%
6	% saluran irigasi dalam kondisi baik	79%	90%	81%	90%	100%	81%
7	Kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	4 kawasan	4 kawasan	100%	4 kawasan	100%
8	% jumlah	90,54%	94%	94,59%	100,63%	96%	98,53%

	jembatan dalam kondisi baik						
9	% panjang jalan dalam kondisi baik	86%	92%	94%	102,17%	95%	98,95%
10	% perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	% infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	40%	80%	43,78%	54,72%	100%	71,57%
12	% peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi (K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	25%	100%	400%	25%	400%
13	Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL)	8%	100%	8,33%	8,33%	100%	8,33%
14	Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab./kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	15%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	26%	25,48%	98%	27%	94,37%
17	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang	25%	35%	223,21%	637,74%	38%	587,39%

	dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber IMB						
--	--	--	--	--	--	--	--

1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun

Dalam rangka konektivitas antar wilayah dengan pusat – pusat keramaian Pemerintah Kota Magelang dari tahun 2016 sd 2019 telah membangun jalan penghubung baru khususnya didaerah timur dan selatan kota Magelang yaitu Jalan Penghubung Tentara Genie Pelajar – Jalan Perintis Kemerdekaan, jalan penghubung Jalan Sarwo Edhie Wibowo – Jalan Jend. Sudirman, jalan penghubung Jalan tentara Genie Pelajar dengan Perumahan Ngembik dan Jalan Penghubung Kel. Cacaban dengan Kel. Kemirirejo, Walaupun status capaian masih dibawah 95%, tetapi sudah melampaui target Tahun 2019, jadi indikator program optimis akan tercapai.

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan baru (m)	942	1.192	1.712	2,055

Sumber: DPUPR 2019

2. Persentase Panjang Trotoar dalam Kondisi Baik

Kondisi awal Tahun 2015 sepanjang 148.168 meter atau sebesar 62,30% trotoar dalam kondisi baik dari 237.830 panjang trotoar di Kota Magelang. Adapun capaian kinerja hingga Tahun 2019 sudah terdapat 177,959 meter trotoar dalam kondisi baik. Optimis target akan tercapai pada akhir RPJMD.

3. Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

Capain indikator kinerja hingga Tahun 2019 tercapai bahkan melampaui target. Kondisi awal dari 237,830 meter kini sudah sepanjang 209,156 meter dalam kondisi baik , Capaian setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tiga tahun RPJMD berjalan. Gambaran pertahun sebagai berikut:

Tahun	2016	2017	2018	2019
Panjang Drainase (m)	237.830	237.830	237.830	237.830
Panjang Drainase dalam kondisi baik (m)	199.777	202.156	207.534	209,156

Sumber, DPUPR 2019

4. Jumlah Shipon yang Dibangun

Hingga tahun 2019 Pemerintah Kota Magelang teralisasi membangun 9 shipon untuk memperlancar saluran drainase, yaitu pada persimpangan dengan jaringan irigasi. Optimis target akan tercapai pada akhir RPJMD 2021 sebanyak 10 buah shipon.

5. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan

Capaian Hingga Tahun 2019 sudah ada 125 badan usaha jasa konstruksi yang mengajukan izin baru dan perpanjangan izin dari 192 jasa usaha konstruksi. Kendala adalah adanya usaha yang tidak segera mengurus perizinan atau vakum.

6. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Rasio jaringan irigasi di Kota Magelang pada tahun 2016 sd 2018 tidak banyak mengalami perubahan karena saluran irigasi yang menjadi wewenang Kota Magelang hanya saluran Kali Kota sedangkan 3 sungai yang melewati Kota Magelang yaitu, Sungai manggis, Sungai Elo dan Sungai Progo bukan wewenang Kota Magelang dalam pemeliharannya. Untuk Saluran Kali Kota panjangnya 5.000 meter, yang menjadi kendala dalam peningkatan panjang irigasi dalam kondisi baik adalah masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan, dengan gambaran data berikut:

Tahun	2016	2017	2018	2019
Panjang Irigasi (m)	5.000	5.000	5.000	5000
Panjang Irigasi dalam kondisi baik (m)	950	950	950	4,050

Sumber: DPUPR, 2019

7. Persentase kawasan strategis yang terbangun

Indikator masih perlu kerja keras, karena dari target akhir sebanyak 4 kawasan, hingga Tahun 2019 masih diarahkan/dikonsentrasikan pada 2 kawasan strategis Kota yaitu Kawasan GOR Samapta dan Kawasan Gunung Tidar. Kawasan GOR pengembangan I (Stadion, Kolam Renang, dan GOR Sanden), Kawasan GOR Pengembangan II (Lapangan tennis indorr dan outdoor), Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar (Gardu Pandang) dan Kawasan Lembah Tidar (Area Kuliner dan Pasar Tradisional), namun secara total DPUPR telah membangun 4 kawasan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

8. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Indikator ini optimis akan tercapai pada akhir RPJMD. Jembatan dalam prasarana infrastruktur merupakan bangunan konstruksi yang sangat penting, karena gunanya adalah meneruskan jalan melalui suatu rintangan yag berada lebih rendah, rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang selalu memelihara dan meningkatkan jembatan, karena peranan jembatan yang sangat penting dalam menopang kelancaran transportasi. Dari tahun 2016 sd 2018 Pemerintah Kota Magelang tidak membuat jembatan baru namun meningkatkan jembatan dengan memperluas dan memperkuat jembatan. Sedangkan jembatan yang dibangun adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah jembatan	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Jembatan yang sudah ditingkatkan
2016	74	67	Jembatan Kel. Jurangombo Selatan

2017	74	69	Jembatan rumkit dr. Soedjono, Jembatan Jl. Tentara Genie Pelajar, Jembatan kalimas dan Jembatan Kel. Kedungsari
2018	74	69	Jembatan rumkit dr. Soedjono, Jembatan Jl. Tentara Genie Pelajar, Jembatan kalimas dan Jembatan Kel. Kedungsari
2019	74	70	Jl. Tobong, Jalan TGP Selatan/ Jembatan Jalan Perintis Kemerdekaan

Sumber. DPUPR, 2019

9. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan di Kota Magelang terbagi menjadi 2 pengelolaan berdasarkan kewenangan yaitu, Jalan milik Pemerintah Pusat/jalan nasional dan Pemerintah Kota Magelang, tahun 2016 jalan milik Pemerintah Provinsi berubah status jalannya menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kota. Secara umum kondisi jalan di Kota Magelang dalam kondisi baik. Jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015 meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Sukarno Hatta, dan Jalan Urip Sumoharjo dengan panjang total 8,430 km, sedangkan kondisi ruas – ruas jalan secara umum sebagai berikut:

Status Jalan	Tahun			
	2018		2019	
	Panjang jalan (km)	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	Panjang jalan (km)	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
Kewenangan Kota	118,915	107,024	118,915	111,780

Sumber. DPUPR, 2019

10. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi

Capain indikator mencapai target yang ditetapkan setiap Tahunnya, dan ditargetkan bahwa semua gedung milik pemerintahan ada dalam kondisi yang laik fungsi, kedepan masih ada bangunan gedung yang akan direvitalisasi, bukan dalam hal kelaikan fungsi, akan tetapi dalam hal penambahan kapasitas dan penambahan fungsi lain yang lebih representatif.

11. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas

Dalam hal aksesibilitas indikator pencapaian tersebar kedalam indikator pada urusan lain, dapat berupa bangunan gedung seperti pasar daerah, kawasan strategis daerah dan fasilitas kesehatan, sedangkan dalam hal aksesibilitas berupa trotoar yang diarahkan untuk memenuhi pencapaian target dari indikator ini, sehingga lebih realistis. Optimis indikator ini akan tercapai. Sampai dengan Tahun 2019 Panjang trotoar yang sudah dilengkapi sarpras aksesibilitas sepanjang 104,132 meter dari total pedestrian target di Kota Magelang yang mencapai 237,830 meter.

12. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)

Capaian indikator mencapai target yang ditetapkan. Optimis indikator akan tercapai pada akhir RPJMD, karena setiap kegiatan sudah disesuaikan dengan SOP dan peraturan perundangan yang tercermin dari terbangunnya fasilitas dan layak serta pelaksanaan pekerjaannya tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir.

13. Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) sampai tahun 2019 baru memiliki 1 dokumen RTRW Kota Magelang atau sekitar 8,33 % dari total 12 dokumen yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031, sedang target di akhir RPJMD (2021) sebanyak 12 dokumen yaitu 1 Perda RTRW , 5 perda RDTRK dan 6 perwal RTBL. Proses Revisi Perda RTRW sudah masuk tahap akhir evaluasi Gubernur Jawa Tengah setelah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN dan kesepakatan antara DPRD dan Walikota Magelang atas Revisi Perda tersebut. Sedangkan di Tahun 2020 RDTRK BWP I dan II sudah masuk proglam legislasi daerah Tahun 2020, RTBL sudah tersedia 2 raperwal yaitu Kawasan Alun-alun dan Kawasan Lembah Tidar, sedangkan di Tahun 2020 akan disusun 2 raperwal RTBL Kawasan Sidotopo dan Kawasan Sukarno Hatta.

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) masih jauh dari target yang ditetapkan, keberadaan dokumen RDTRK dan RTBL yang merupakan dokumen operasional dalam penataan ruang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah, saat ini prses revisi RTRW masih dalam tahap akhir Evaluasi Gubernur.
2. Banyaknya alih fungsi lahan sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahnya di daerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Harmonisasi rencana pola ruang/fungsi ruang dengan kabupaten Magelang dengan delineasi batas sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2017.

5. Adanya aturan-aturan baru yang harus dipenuhi terkait dengan penyusunan dokumen RTRW , RDTRK serta Proses Persetujuan Subtansinya, termasuk Perpres percepatan pembangunan Nomor 79 Tahun 2019 di Purwomanggung.

Upaya yang harus dilakukan agar target Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) dapat terus tercapai yaitu

1. Tetap konsisten sesuai jadwal dalam memenuhi proses penetapan Dokumen RTRW, RDTRK dan RTBL. Dimana untuk Tahun 2020, Raperda revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW harus bisa ditetapkan sehingga 5 (lima) Raperda RDTRK sebagai turunan dari Perda RTRW bisa ditetapkan hingga Tahun 2021.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN yang memberikan Persetujuan Subtansi.
3. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya harmonisasi pola ruang dan batas wilayah administrasi.

14. Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara OPD teknis yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan. Walaupun indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ini selalu tercapai 100%, jumlah pengajuan pada Tahun 2019 yang sudah di terbitkan total mencapai 480, dengan rincian Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sejumlah 208, Informasi Rencana Kota (IRK) sejumlah 151, dan IRK Pemutihan sejumlah 121. Kendala dalam pelaksanaan perijinan, diantaranya sebagian besar masyarakat melakukan ijin setelah ada aktivitas pembangunan, sehingga berdampak kesulitan dalam memberikan arahan kesesuaian peruntukan ruangnya. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW serta meningkatkan pengendalian dan pelayanan informasi penataan ruang.

15. Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru tercapai 100% dari target yang ditetapkan di Tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini karena Pemerintah Kota Magelang sudah mempunyai peta analog dengan citra satelit dan hasil Drone sampai dengan Tahun 2019, adapun digital sudah ada data peta berbentuk aplikasi sistem informasi geografis.

Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya Ranperda Revisi RTRW dan Raperda 5 Raperda tentang RDTRK BWP I,II,III,IV, dan V yang menunggu hasil revisi Perda

RTRW Kota Magelang. Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dengan menginformasikan mengenai peta RTRW Kota Magelang ke Kelurahan dan masyarakat, selain itu informasi mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang, Taman badaan, dan Kawasan Pemerintah Kota. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang sampai Tahun 2031.

16. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan

Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ditargetkan 33% di Tahun 2021, dengan target 2019 sebesar 26% dengan jumlah bangunan sebanyak 40,602 bangunan, tercatat realisasi sebanyak 10,347 bangunan atau sebesar 25.48% yang sudah ber-IMB. Perkembangan rumah ber IMB tiap tahunnya rata-rata kurang dari 1 % atau 400 unit rumah. Untuk mencapai target 33% dibutuhkan kenaikan sebesar 7,25% atau sebanyak 2944 unit bangunan, jadi dengan sisa 2 tahun (2020 dan 2021), maka diperlukan 1472 unit bangunan per tahunnya, dipertimbangkan untuk rasionalisasi target bangunan ber IMB yang bisa dipercepat penambahannya dengan kegiatan pemutihan yang dilaksanakan DPMPSTSP dengan dibantu tenaga dari DPUPR

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu:

- 1). Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
- 2). Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
- 3). Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:

- 1). meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
 - 2). sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di tiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia.
 - 3). Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat terutama untuk bangunan perumahan.
 - 4). Perlu peninjauan kembali target bangunan ber IMB, dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan serta waktu yang tersisa.
17. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB

Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 637.76% dari target tahun 2019 sebesar 35 % dan 40 % di Tahun 2021, jumlah surat teguran terkirim di akhir tahun 2019 sebanyak 375, hal ini terkait dengan efektifitas kinerja dari tim pengawasan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang ada di 17 kelurahan. Dengan kinerja yang efektif dan efisien dengan adanya inovasi blangko surat teguran di masing-masing kelurahan maka target akhir RPJMD2021 sebesar 38% dapat tercapai atau terlampaui.

III.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	SP2D		Realisasi
			Rp.	%	
1	3	4	5	6	10
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.715.620.000	74.884.712.996	95,13%	100,00%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100.000	80.000	80,00%	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	345.000.000	284.273.445	82,40%	100,00%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	45.050.000	45.035.000	99,97%	100,00%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.050.000	23.225.275	92,72%	100,00%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	315.011.000	279.953.700	88,87%	100,00%

6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	157.209.000	152.901.974	97,26%	100,00%
7	Penyediaan alat tulis kantor	25.861.000	25.861.000	100,00%	100,00%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.479.000	19.474.450	99,98%	100,00%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.398.000	8.391.000	99,92%	100,00%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000	2.280.000	100,00%	100,00%
11	Penyediaan bahan logistik kantor	1.860.000	1.860.000	100,00%	100,00%
12	Penyediaan makanan dan minuman	54.484.000	51.869.000	95,20%	100,00%
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	213.360.000	210.308.860	98,57%	100,00%
14	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	268.270.000	265.353.023	98,91%	100,00%
15	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.926.000	10.850.150	99,31%	100,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
16	Pembangunan gedung kantor	12.225.000.000	11.896.166.100	97,31%	100,00%
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000	196.200.600	98,10%	100,00%
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	285.000.000	269.554.924	94,58%	100,00%
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	4.934.800	98,70%	100,00%
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000	19.775.000	98,88%	100,00%
21	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	100.000.000	94.353.000	94,35%	100,00%
22	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	56.250.000	44.442.500	79,01%	100,00%
23	Perencanaan Bangunan Gedung	109.250.000	104.307.500	95,48%	100,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16.654.000	16.470.000	98,90%	100,00%
25	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	9.139.000	9.052.000	99,05%	100,00%
26	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.636.000	10.397.900	97,76%	100,00%
27	Penyusunan Rencana Kerja OPD	19.014.000	18.842.000	99,10%	100,00%
28	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	24.037.000	23.809.500	99,05%	100,00%
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.810.000	7.716.000	98,80%	100,00%
30	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000	14.084.000	93,89%	100,00%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
31	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	2.110.000.000	1.979.892.000	93,83%	100,00%
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					
32	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	516.066.000	512.037.280	99,22%	100,00%
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
33	Pemeliharaan Jalan	752.059.000	740.445.000	98,46%	100,00%
34	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	15.732.741.000	14.742.241.086	93,70%	100,00%
35	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	1.078.544.000	1.023.222.500	94,87%	100,00%

36	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	444.000.000	418.011.400	94,15%	100,00%
37	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	632.000.000	569.674.000	90,14%	100,00%
38	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)	106.150.000	102.328.000	96,40%	100,00%
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan					
39	Penyusunan data dan profil OPD	14.019.000	9.536.500	68,03%	100,00%
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					
40	Pemeliharaan jaringan irigasi	82.000.000	76.411.800	93,19%	100,00%
41	Identifikasi Saluran Irigasi Kota Magelang	53.750.000	53.477.000	99,49%	100,00%
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya					
42	Pembangunan Talud Sungai	1.715.000.000	1.667.513.500	97,23%	100,00%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
43	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	1.250.000.000	1.215.476.750	97,24%	100,00%
44	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)	10.500.000.000	10.230.431.000	97,43%	100,00%
45	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	1.118.032.000	947.480.174	84,75%	100,00%
46	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	11.482.738.000	11.334.872.850	98,71%	100,00%
Program Pengaturan Jasa Konstruksi					
47	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	23.765.000	18.686.000	78,63%	100,00%
48	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	38.288.000	34.554.000	90,25%	100,00%
49	Pembinaan jasa konstruksi	44.456.000	39.327.500	88,46%	100,00%
50	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	22.012.000	20.662.500	93,87%	100,00%
Program pengawasan jasa konstruksi					
51	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	24.572.000	14.677.000	59,73%	100,00%
52	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	431.816.000	427.482.800	99,00%	100,00%
53	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	26.000.000	21.537.750	82,84%	100,00%
Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong					
54	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan	500.000.000	473.994.000	94,80%	100,00%
55	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara	1.990.000.000	1.915.862.000	96,27%	100,00%
56	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban	234.225.000	230.964.000	98,61%	100,00%
57	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong	1.609.825.000	1.350.661.000	83,90%	100,00%
58	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan	1.425.000.000	1.406.632.000	98,71%	100,00%
59	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin	575.300.000	573.298.400	99,65%	100,00%

60	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari	740.000.000	683.929.500	92,42%	100,00%
61	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya	685.300.000	485.632.800	70,86%	100,00%
62	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang	1.064.000.000	1.007.654.000	94,70%	100,00%
63	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara	500.000.000	482.148.000	96,43%	100,00%
64	Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu)	5.170.080.000	4.611.816.100	89,20%	100,00%
Program Perencanaan Tata Ruang					
65	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	386.778.000	361.466.000	93,46%	100,00%
66	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	361.181.000	344.352.034	95,34%	100,00%
67	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	165.442.000	152.632.321	92,26%	100,00%
Program Pemanfaatan Ruang					
68	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	175.268.000	166.643.800	95,08%	100,00%
69	Survey dan pemetaan	13.648.000	13.439.000	98,47%	100,00%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	160.079.000	153.486.200	95,88%	100,00%
	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	49.004.000	45.228.000	92,29%	100,00%
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan					
108	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	25.000.000	23.350.750	93,40%	100,00%
TOTAL		78.715.620.000	74.884.712.996	95,13%	100,00%

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Rumah yang mempunyai IMB di Kota Magelang Baru sekitar 25%, karena kesadaran dan pengetahuan warga yang masih kurang dalam hal IMB.
2. belum ditetapkannya Ranperda Revisi RTRW dan Raperda 5 Raperda tentang RDTRK BWP I,II,III,IV, dan V yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang
3. Secara umum infrastruktur di Kota Magelang sudah dalam kondisi baik, namun masih ada beberapa permasalahan mendasar antara lain belum sesuai universal design
4. Masih ada beberapa ruas jalan di Kota Magelang yang masih perlu peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinyu untuk menjaga kondisi jalan selalu dalam kondisi baik;
5. Untuk penambahan jalan penghubung baru terkendala aset yang bukan kewenangan Pemerintah Kota Magelang;

6. Untuk ruas jalan yang masih menjadi kewenangan pusat banyak yang sudah over capacity kendaraan dan sering macet serta ruas Jalan Sukarno Hatta kondisi jalannya banyak yang berlubang, sehingga memerlukan perhatian dan koordinasi dengan pusat untuk penanganannya.
7. Dalam penanganan drainase perlu adanya penyusunan master plan drainase perkotaan di tiap kecamatan di Kota Magelang dan pemeliharaan/peningkatan saluran drainasenya.
8. Peralatan penunjang pendukung bidang pekerjaan umum masih kurang, seperti alat berat dan peralatan uji kebinamargaan.

Solusi

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
2. Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat terutama untuk bangunan perumahan.
3. Peninjauan kembali kajian terkait dengan penempatan reklame dan IMBnya
4. Mengajukan program legislasi daerah untuk pentapan Raperda RDTRK BWP III, IV, dan V menjadi Perda
5. Pembaharuan peta analog sebagai dasar evaluasi dan penyusunan Dokumen Operasional RTRW (RDTR dan RTBL)
6. Pelengkapan jalan utama kota dengan jalur pedestrian yang bai dan layak, dengan mengakomodasi universal acces design
7. Sosialisasi percepatan rekomendasi teknis perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi
8. Pemeliharaan saluran irigasi, dan pensertifikatan aset di Saluran milik Daerah
9. Melakukan fokus penyelesaian pada bangunan-bangunan di kawasan strategis kota terutama Kawasan GOR Samapta dan Kawasan Gunung Tidar
10. Koordinasi pengelolaan dan pengairan dengan mitra kerja BBWS Serayu Opak (Kemeterian), dan Balai PSDA Progo-Bogowonto-Luk Ulo Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
11. Penyediaan/rehabilitasi Irigasi teknis penunjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah
12. Pemenuhan kelengkapan alat kebinamargaan dan laboratorium teknis
13. Rehabilitasi Jalan Kota sesuai spesifikasi teknis dan kualitas pengaspalan jalan
14. Mempertahankan capaian kualitas pelaksanaan jasa konstruksi dengan bermitra dengan APH (kejaksaan dan kepolisian) dan praktisi dari akademisi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kota dan Penataan Ruang Magelang, disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2019 serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2019 ada 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah memenuhi target, 1 (satu) indikator realisasinya tinggi, 1 (satu) indikator realisasinya rendah dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target OPD.
3. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi :
 - a). Diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai untuk bersama-sama agar indikator kinerja yang belum mencapai target RPJMD dan SPM dapat segera tercapai.
 - b). Perlu adanya kebijakan dan inovasi dalam penerapan dan pencapaian indikator kinerja supaya selain dapat dirasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur oleh masyarakat, pembangunan juga dapat mengatasi permasalahan yang ada.

c). Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan strategis periode lima tahun yang akan datang serta penyempurnaan program dan kegiatan yang diperlukan.

Magelang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG**

CHRISATRYA YONAS, N, B, ST
NIP. 19690527 200312 1 002